

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai *Public Private Partnership* (PPP) Wira – wiri Suroboyo dengan Pemerintah Kota Surabaya dalam penyediaan transportasi publik di Kota Surabaya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, persiapan proyek Wira-Wiri Suroboyo melalui konsep Public-Private Partnership (PPP) melibatkan Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan Wira-Wiri Suroboyo untuk meningkatkan efisiensi transportasi dengan menyediakan layanan publik yang lebih baik. Tahapan persiapan proyek menurut teori PPP mencakup identifikasi kebutuhan masyarakat, penentuan tujuan proyek, namun tidak melibatkan pembentukan tim pengkaji independen karena manajemen proyek dilakukan oleh pihak pemerintah Kota Surabaya sendiri.

Kedua, *Public Private Partnership* (PPP) dalam bentuk kerjasama atau relasi antara Pemerintah Kota Surabaya dan Wira-Wiri Suroboyo bertujuan meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan transportasi. Proses PPP ini melibatkan pengembangan, pendanaan, regulasi, promosi, dan pengawasan dari Pemkot Surabaya. Tahapan dalam teori PPP untuk bentuk kerjasama atau relasi mencakup penentuan tujuan proyek, kapasitas pemerintah dalam perencanaan dan implementasi, serta partisipasi masyarakat untuk meningkatkan penerimaan dan kualitas layanan transportasi.

Dan yang terakhir ketiga, Hubungan kerjasama atau relasi antara Pemerintah Kota Surabaya dan Wira-Wiri Suroboyo bertujuan meningkatkan layanan transportasi melalui pembangunan infrastruktur, investasi swasta, pendanaan bersama, dan manajemen operasional. Dalam konteks PPP untuk hubungan kerjasama atau relasi, tahapan mencakup aspek seperti jaminan kepatuhan, transparansi, komunikasi, dan evaluasi, meskipun tanpa melibatkan keterlibatan signifikan sektor swasta dalam operasionalnya.

Berdasarkan keseluruhan penelitian dan analisis dapat disimpulkan apabila Proyek Wira-Wiri Suroboyo melibatkan kerjasama antara Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan Wira-Wiri Suroboyo untuk meningkatkan efisiensi transportasi melalui konsep Public-Private Partnership (PPP). Dalam tahapan persiapan proyek, pemerintah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan menentukan tujuan tanpa membentuk tim pengkaji independen. PPP ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan transportasi dengan melibatkan pemerintah dalam pengembangan, pendanaan, regulasi, promosi, dan pengawasan. Tahapan PPP juga mencakup perencanaan, partisipasi masyarakat, dan evaluasi untuk memastikan transparansi dan kepatuhan, meskipun sektor swasta tidak terlibat signifikan dalam operasional.

5.2 Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Diharapkan Optimalisasi Identifikasi Kebutuhan dan Tujuan Proyek:

- Melibatkan tim pengkaji independen untuk memberikan perspektif objektif dan memperkaya analisis kebutuhan masyarakat.
 - Mengadakan konsultasi publik secara berkala untuk memastikan kebutuhan masyarakat tercakup dan tujuan proyek sesuai dengan harapan pengguna transportasi.
- 2) Penguatan kapasitas pemerintah dalam perencanaan dan implementasi seperti :
- Meningkatkan kapasitas teknis dan manajerial Dinas Perhubungan Kota Surabaya melalui pelatihan dan workshop.
 - Mengadopsi praktik terbaik dari proyek PPP di kota atau negara lain untuk memperbaiki proses perencanaan dan implementasi.
- 3) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menggunakan moda transportasi umum seperti :
- Melibatkan komunitas dan kelompok masyarakat dalam tahap perencanaan dan pengawasan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
 - Menggunakan teknologi informasi untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat, seperti platform online untuk pengumpulan masukan dan keluhan.
- 4) Meningkatkan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan seperti :
- Membentuk mekanisme pengawasan independen yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan kepatuhan dan transparansi.

- Melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja proyek dan dampaknya terhadap masyarakat, serta menyesuaikan strategi berdasarkan hasil evaluasi.

5) Mencoba kolaborasi dengan sektor swasta seperti :

- Meskipun keterlibatan sektor swasta dalam operasional tidak signifikan, penting untuk menjajaki potensi kolaborasi yang lebih dalam bidang investasi dan inovasi teknologi.
- Mendorong investasi swasta melalui insentif dan kemudahan regulasi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pengembangan layanan transportasi.